



BUPATI SEKADAU
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI SEKADAU
NOMOR 21 TAHUN 2014

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SEKADAU NOMOR 1 TAHUN 2011
TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
PEMERINTAH KABUPATEN SEKADAU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SEKADAU,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil evaluasi terhadap indikator Kinerja Utama Kabupaten Sekadau berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2011, perlu dilakukan penyesuaian dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : Per/20/Menpan/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008, tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati Sekadau tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Sekadau Nomor 1 Tahun 2011 tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Sekadau;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Melawi dan Kabupaten Sekadau di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4344);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 4614);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 4737);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 4741);
14. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor/PER/20/MENPAN/11/2008 tentang Pentunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama.
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.
16. Peraturan Daerah Kabupaten Sekadau Nomor 4 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Sekadau Tahun 2005 - 2025
17. Peraturan Daerah Kabupaten Sekadau Nomor 11 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sekadau Tahun 2011-2015;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Sekadau Nomor 7 Tahun 2008 tentang Kewenangan Daerah.(Lembaran Daerah Kabupaten Sekadau Tahun 2008 Nomor 7);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Sekadau Nomor 8 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sekadau (Lembaran Daerah Kabupaten Sekadau Tahun 2008 Nomor 8); sebagaimana telah di ubah terakhir kalinya Peraturan Daerah Kabupaten Sekadau Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sekadau Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sekadau (Lembaran Daerah Kabupaten Sekadau Tahun 2014 Nomor 2);

Menetapkan : PERATURAN BUPATI SEKADAU TENTANG PERUBAHAN
ATAS PERATURAN BUPATI SEKADAU NOMOR 1 TAHUN
2011 TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
PEMERINTAH KABUPATEN SEKADAU

Pasal 1

Lampiran Peraturan Bupati Sekadau Nomor 1 Tahun 2011
tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Kabupaten
Sekadau (Berita Daerah Kabupaten sekadau Nomor 2),
diubah, sehingga perubahan tersebut sebagaimana tercantum
dalam lampiran peraturan ini yang merupakan bagian yang
terpisahkan.

Pasal II

Peraturan Bupati ini berlaku sejak tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya
dalam Berita Daerah Kabupaten Sekadau.

Ditetapkan di Sekadau
pada tanggal 28 Agustus 2014

BUPATI SEKADAU,

Ttd

SIMON PETRUS

Diundangan di Sekadau
Pada tanggal 28 Agustus 2014
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SEKADAU,

Ttd

YOHANES JHON

Berita Daerah Kabupaten Sekadau Tahun 2014 Nomor 13

Salinan Sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum dan HAM
Setda. Kabupaten Sekadau


SUBHAN, S.Sos. M. Si
Pembina

NIP. 197504261994121001

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	RUMUS PERHITUNGAN	SATUAN	SKPD PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1.1 Meningkatkan produksi, produktivitas dan kualitas produk tanaman pangan dan hortikultura	1 Peningkatan produksi tanaman pangan dan hortikultura :				Dinas Pertanian, Perikanan dan Peternakan
	a Tanaman Pangan :				
	- padi	Jumlah Produksi	ton		
	- jagung	Jumlah Produksi	ton		
	- kedelai	Jumlah Produksi	ton		
	b Hortikultura :				
	- Durian	Jumlah Produksi	kw		
	- Pisang	Jumlah Produksi	kw		
	- Rambutan	Jumlah Produksi	kw		
	- Duku/Langsar	Jumlah Produksi	kw		
	- Jeruk	Jumlah Produksi	kw		
	- Nangka/Cempedak	Jumlah Produksi	kw		
	2 Peningkatan produktivitas tanaman pangan dan hortikultura :	Jumlah produksi Luas Lahan	x100		
	a Tanaman Pangan				
	- padi		Kw/ha		
	- jagung		Kw/ha		
- kedelai		Kw/ha			
b Hortikultura					
- Durian		Kw / Ha			
- Pisang		Kw / Ha			
- Rambutan		Kw / Ha			
- Duku/Langsar		Kw / Ha			
- Jeruk		Kw / Ha			
- Nangka/Cempedak		Kw / Ha			
1.2 Meningkatkan Produksi dan Produktivitas Perkebunan	1 Produksi perkebunan :				Dinas Kehutanan dan Perkebunan
	- Kelapa Sawit	Jumlah Produksi	Ton		
	- Karet	Jumlah Produksi	Ton		
	- Kakao	Jumlah Produksi	Ton		
	- Kelapa Dalam	Jumlah Produksi	Ton		
	2 Peningkatan produktivitas tanaman perkebunan	Jumlah produksi Luas Lahan	x100		
	- Kelapa Sawit		Kw / Ha		
	- Karet		Kw / Ha		
- Kakao		Kw / Ha			
- Kelapa Dalam		Kw / Ha			
1.3 Meningkatkan Produksi dan Produktivitas Hasil Peternakan	1 Peningkatan produksi peternakan :				Dinas Pertanian, Perikanan dan Peternakan
	a Daging	Jumlah Produksi	ton		
	b Telur	Jumlah Produksi	ton		

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	RUMUS PERHITUNGAN	SATUAN	SKPD PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
	2 Peningkatan populasi ternak :				
	a Ternak besar dan kecil				
	- sapi potong	Jumlah ternak	ekor		
	- kambing	Jumlah ternak	ekor		
	- babi	Jumlah ternak	ekor		
	b Ternak unggas				
	- Ayam Buras/Pedaging	Jumlah unggas/itik	ekor		
	- Ayam Ras/Petelur	Jumlah unggas/itik	ekor		
	- Itik	Jumlah unggas/itik	ekor		
	3 Produktivitas peternakan program IB :				
	- service per conception	Jumlah IB yang diberikan	x100	kali	
	- calving interval	Jumlah IB yang berhasil			
	- conception rate	Jarak kelahiran Pedet/anakan dimana, C = conception, IB pertama bunting R = Rate, angka kebuntingan		bulan %	
1.4 Meningkatnya produksi perikanan	1 Produksi perikanan	Jumlah produksi hasil perikanan			Dinas Pertanian, Perikanan dan Peternakan
	a Hasil perikanan budidaya	Jumlah produksi hasil perikanan budidaya air tawar		kwt/ton	
	b Hasil perikanan tangkapan	Jumlah produksi hasil perikanan tangkapan		kwt/ton	
	2 Cakupan bina kelompok budidaya perikanan	Jumlah pembinaan kelompok tahun n	x100	%	
		Jumlah seluruh kelompok			
1.5 Meningkatnya Pengelolaan Hasil Hutan dengan memperhatikan Fungsi Pelestarian Hutan	1 Rehabilitasi hutan dan lahan kritis	Luas hutan dan lahan kritis yang direhabilitasi	x 100%	%	Dinas Kehutanan dan Perkebunan
		Luas total hutan dan lahan kritis			
	2 Kerusakan Kawasan Hutan	Luas Kerusakan Kawasan Hutan	x 100%	%	
		Luas Kawasan Hutan			
1.6 Meningkatnya ketersediaan pangan daerah	1 Ketersediaan energi dan protein per kapita	$\frac{\text{Ketersediaan Pangan/Kapita/Hari} \times \text{Kandungan kalori} \times \text{BDD}}{100}$		Kkal/Kapita/Hari	Badan ketahanan Pangan dan Penyuluhan
	2 Penguatan Cadangan Pangan	$\frac{\text{Jumlah Cad. Pangan Kabupaten/Kota}}{100 \text{ ton}}$	X100%	%	
1.7 Meningkatnya pengembangan seni budaya dan pariwisata	1 Prosentase Peningkatan Jumlah Kunjungan Wisatawan	Jumlah kunjungan tahun n - tahun (n-1)	X100%	%	Dinas Hubtelinfobudpar
		Jumlah seluruh pengunjung			
	2 Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB	Jumlah Kontribusi FDRB dari sektor pariwisata		%	
		$\frac{\text{Jumlah total PDRB}}{\text{Jumlah total PDRB}} \times 100\%$	X100%		

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	RUMUS PERHITUNGAN	SATUAN	SKPD PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
	3 Penyelenggaraan even seni dan budaya daerah	Kali kegiatan	kali	Dinas Hubtelinfodupar	
	4 Peningkatan Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan	Jumlah situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan Seluruh situs dan cagar budaya	x100% %		
1.8 Meningkatnya perlindungan konsumen dan pelayanan perdagangan	1 Ekspor Bersih Perdagangan	nilai ekspor bersih = nilai ekspor – nilai impor	USD	DisperindakopUKM	
	2 Cakupan bina kelompok pedagang/usaha informal	jumlah kelompok pedagang/usaha informal yg dibina tahun n jumlah kelompok pedagang/usaha informal	x100 %		
	3 Persentase penggunaan uji ukur timbangan dan perlengkapan-pannya (UUTP) yang memenuhi ketentuan Tera	jumlah alat ukur, takaran, timbangan, dan perlengkapannya(UUTP) yang ditera ulang jumlah UUTP yang digunakan	x100 %		
	4 Kontribusi sektor Perdagangan terhadap PDRB	Jumlah Kontribusi PDRB dari sektor Perdagangan Jumlah total PDRB	x100 %		
1.9 Meningkatnya Produksi Sektor Industri	1 Perkembangan Industri Kecil Menengah :			DisperindakopUKM	
	a jumlah unit	Jumlah dalam tahun n	unit		
	b tenaga kerja	Jumlah dalam tahun n	org		
	c nilai investasi	Jumlah dalam tahun n	milyar		
	d nilai produksi	Jumlah dalam tahun n	milyar		
	2 Pertumbuhan Industri	Jumlah Industri tahun n - Jumlah Industri tahun n-1 Jumlah Industri s/d tahun n-1	x100% %		
	3 Kontribusi sektor Perdagangan terhadap PDRB	Jumlah Kontribusi PDRB dari sektor Perdagangan Jumlah total PDRB	x100% %		
1.10 Meningkatnya transmigrasi swakarsa	1 Transmigran swakarsa	Jumlah transmigran swakarsa Jumlah transmigran	x 100% %	Dinsosnakertrans	
2.1 Meningkatnya Pemerataan dan Kualitas Pendidikan	1 Angka Partisipasi Murni	Jumlah anak sekolah SD/SMP/SMA usia (7-12 / 13-15 / 16-18)		Dinas Pendidikan Pemuda dan OR	
	- SD/MI		x100%	%	
	- SMP/MTs	Jumlah anak usia (7-12/ 13-15 / 16-18)		%	
	- SMA/MA/SMK			%	
	2 Angka Partisipasi Kasar	Jumlah anak sekolah SD/SMP/SMA Jumlah anak usia (7-12/ 13-15 / 16-18)	x100%	%	
	- SD/MI			%	
	- SMP/MTs			%	
	- SMA/MA/SMK			%	
	3 Angka Putus Sekolah	Jumlah anak SD/SMP/SMA yang putus sekolah			
	- SD/MI		x100%	%	
	- SMP/MTs	Jumlah anak sekolah SD/SMP/SMA		%	
	- SMA/MA/SMK			%	

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	RUMUS PERHITUNGAN	SATUAN	SKPD PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
	4 Rata - Rata Nilai UN dan UASB	Jumlah nilai X jumlah peserta ujian SD/SMP/SMA Jumlah peserta Ujian SD/SMP/SMA	angka angka angka		
	- SD/MI				
	- SMP/MTs				
	- SMA/MA/SMK				
	5 Persentase guru sesuai kualifikasi:	Jumlah guru berijazah kualifikasi S1/D-IV Jumlah guru SD/MI SMP/MTs, SMA/SMK/MA	x100%	% % %	
	- SD/MI				
	- SMP/MTs				
	- SMA/MA/SMK				
	6 Angka Kelulusan (AL)	Jumlah lulusan pada jenjang SD/SMP/SMA Jumlah siswa tingkat tertinggi pada jenjang SD/SMP/SMA	x100%	% % %	
	- SD/MI				
	- SMP/MTs				
	- SMA/MA/SMK				
	7 Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Jumlah Siswa jenjang TK/RA/Penitipan anak Jumlah anak usia 4 - 6	x100%	%	
	8 Penduduk yang berusia >15 tahun melek huruf (tidak buta aksara)	Jumlah Penduduk usia 15 thn ke atas dapat baca tulis Jumlah penduduk usia 15th ke atas	x100%	%	
	9 Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs	Jumlah siswa baru tingkat I pada jenjang SMP/MTs Jumlah lulusan pd jenjang SD/MI tahun ajaran sebelumnya	x100%	%	
	10 Angka Melanjutkan (AM) dari SMP/MTs ke SMA/SMK/MA	Jumlah siswa baru tingkat I pada jenjang SMA/SMK/MA Jumlah lulusan pd jenjang SMP/MTs tahun ajaran sebelumnya	x100%	%	
	11 Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV	Jumlah guru berijazah kualifikasi S1/D-IV Jumlah Guru SD/MI, SMP/MTs, SMA/SMK/MA	x100%	%	
2.2 Meningkatnya prestasi olah raga dan pemuda	1 Jumlah pemuda berprestasi	Jumlah pemuda berprestasi tahun n		org	Dinas Pendidikan Pemuda dan OR
	2 Jumlah cabang olah raga berprestasi	Jumlah cabang olah raga berprestasi tahun n		jenis	
	3 Gelanggang / balai remaja (selain milik swasta)	Jumlah gelanggang/balai remaja di kabupaten Jumlah penduduk	x100%	%	
	4 Lapangan olahraga	Jumlah lapangan olahraga di kabupaten Jumlah penduduk	x100%	%	
2.3 Meningkatnya minat baca masyarakat	1 Persentase Pengunjung Perpustakaan	Jumlah kunjungan ke perpustakaan selama 1 tahun Jumlah orang dalam populasi yg harus dilayani	x100%	%	Kantor Perpustakaan, Kearsipan dan Dokumentasi
	2 Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah	Jumlah koleksi judul buku yg tersedia di perpustakaan daerah Jumlah koleksi jumlah buku yg tersedia di perpustakaan	x100%	%	

SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR KINERJA UTAMA		RUMUS PERHITUNGAN	SATUAN	SKPD PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
2.4	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	1	Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani	Jumlah komplikasi kebidanan yg mendpt penanganan difinitif di satu wilayah kerja pd kurun waktu tertentu	x100%	%	Dinas Kesehatan
				Jumlah ibu dgn komplikasi kebidanan di satu wilayah kerja Pada kurun waktu yg sama			
		2	Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan	Jumlah ibu bersalin yg ditolong oleh tenaga kesehatan Di satu wilayah kerja pd kurun waktu tertentu	x100%	%	Dinas Kesehatan
				Jumlah seluruh sasaran ibu bersalin di satu wilayah Kerja dalam kum waktu yg sama			
		3	Cakupan Desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI)	Jumlah Desa / Kelurahan UCI	x100%	%	Dinas Kesehatan
				Jumlah Seluruh Desa / Kelurahan			
		4	Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat perawatan	Jumlah balita gizi buruk mendapat perawatan di sarana Pelay. Kes. Di sati wil. Kerja pd kurun wkt tertentu	x100%	%	Dinas Kesehatan
				Jumlah seluruh balita gizi buruk buruk yang ditemukan Di satu wilayah kerja dalamwaktu yang sama			
		5	Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA	Jumlah penderita baru TBC BTA (+) yang Ditemukan dan diobati di satu wil. Kerja selama 1 thn	x100%	%	Dinas Kesehatan
				Jumlah seluruh balita gizi buruk buruk yang ditemukan Kurun waktu yang sama			
		6	Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD	Jumlah penderita DBD yang ditangani sesuai SOP di satu wil. Kerja selama 1 thn	x100%	%	Dinas Kesehatan
Jumlah penderita DBD yang ditemukan di satu wilayah dalam Kurun wkt yang sama							
7	Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin	Jumlah kunjungan pasien maskin di sarana kesehatan Strata 1	x100%	%	Dinas Kesehatan		
		Jumlah seluruh maskin di Kab/Kota					
8	Cakupan kunjungan bayi	Jumlah kunjungan bayi memperoleh pelayanan kesehatan sesuai standar di satu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu	x100%	%	Dinas Kesehatan		
		Jumlah seluruh bayi lahir hidupdi satu wilayah kerja pada Kurun waktu yang sama					
9	Jumlah tenaga medis dan paramedis Dokter spesialis. Dokter umum Dokter gigi Bidan Perawat	Jumlah tenaga medis dan paramedis			Dinas Kesehatan		
		org					
		org					
		org					
		org					
10	Jumlah penduduk yang memanfaatkan Rumah sakit	Jumlah penduduk yg berkunjung kerumah sakit	org	RSUD			
11	Bed Occupancy Rate (BOR)	Jumlah hari perawatan	x100%	%	RSUD		

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	RUMUS PERHITUNGAN	SATUAN	SKPD PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
	12 Turnover Interval (TOI)	(Jumlah tempat tidur x 365) - Hari perawatan	kali	RSUD	
	13 Nett Dead Rate	Jumlah pasien mati < 48 jam dalam satu tahun	org	RSUD	
2.5 Terselenggaranya pelayanan keluarga berencana dan keluarga sejahtera	1 Cakupan peserta KB aktif	Jumlah peserta program KB aktif Jumlah pasangan usia subur	x100%	%	Kantor KB, PP dan PA
	2 Persentase Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I	Jumlah Keluarga pra sejahtera dan sejahtera I Jumlah Keluarga	x100%	%	
	3 Rasio petugas lapangan KB/penyuluh KB (PLKB/PKB) disetiap desa/kelurahan	Jumlah desa/kelurahan PLKB/PKB	x100%	%	
2.6 Meningkatnya Pemenuhan kebutuhan pembangunan Infrastruktur	1 Panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik	Panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik Panjang seluruh jalan kabupaten di daerah tersebut	x100%	%	Dinas PU dan Pertambangan
	2 Luas irigasi Kabupaten dalam kondisi baik	Luas irigasi kabupaten dalam kondisi baik Luas irigasi kabupaten	x100%	%	
	3 Rumah Tangga Per Sanitasi	Jumlah rumah tangga ber sanitasi Jumlah total rumah tangga	x100%	%	
	4 Kawasan Kumuh	Luas Kawasan Kumuh Luas Wilayah	x100%	%	
	5 Kondisi Jalan Kabupaten				
	- Baik	panjang jalan		Km	
	- Sedang	panjang jalan		Km	
	- Rusak	panjang jalan		Km	
	Rusak Berat	panjang jalan		Km	
	6 Kondisi Jalan				
	- Aspal	panjang jalan		Km	
	- Kerikil	panjang jalan		Km	
	- Tanah	panjang jalan		Km	
2.7 Tercapainya pemenuhan kebutuhan pelayanan irigasi	1 Persentase panjang jaringan irigasi kondisi baik	Panjang jaringan irigasi dalam kondisi baik Panjang jaringan irigasi yang ada	x100%	%	Dinas PU dan Pertambangan
	2 Persentase kelompok HIPPA yang aktif	kelompok HIPPA aktif Jumlah kelompok HIPPA yang ada	x100%	%	
	3 Rasio ketersediaan air irigasi pada setiap musim tanam berdasarkan rencana tata tanam yang ditetapkan	ketersediaan air irigasi pada setiap musim tanam berdasarkan rencana tata tanam yang ditetapkan Kebutuhan air irigasi pada setiap musim tanam berdasarkan rencana tata tanam yang ditetapkan	x100%	%	
2.8 Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana permukiman	1 Rumah tangga pengguna air bersih	Jumlah rumah tangga pengguna air bersih Jumlah seluruh rumah tangga	x100%	%	Dinas PU dan Pertambangan

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	RUMUS PERHITUNGAN	SATUAN	SKPD PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA		
	2	Lingkungan pemukiman kumuh	$\frac{\text{Luas lingkungan permukiman kumuh}}{\text{Luas wilayah}}$	x100%	%		
	3	Rumah layak huni	$\frac{\text{Jumlah rumah layak huni}}{\text{Jumlah seluruh rumah di wilayah pemda ybs.}}$	x100%	%		
	4	Rumah bersanitasi	$\frac{\text{Jumlah rumah bersanitasi}}{\text{Jumlah seluruh rumah}}$	x100%	%		
2.9	Meningkatnya Pelayanan Transportasi Daerah yang Aman, Lancar, dan Terjangkau	1	Persentase sarana angkutan yang laik jalan	$\frac{\text{Jumlah angkutan umum yang lulus uji kir tahun n}}{\text{Jumlah angkutan umum yang beroperasi tahun n}}$	x100%	%	Dishubtelinforbudpar
		2	Prosentase Pemasangan Rambu-rambu	$\frac{\text{Jumlah rambu yang dibangun pada tahun n}}{\text{Jumlah kebutuhan rambu dalam 5 tahun}}$	x100%		
			a. APILL		%		
			b. Flash Light		%		
			c. Rambu		%		
		3	Prosentase pemenuhan prasarana lalu lintas	$\frac{\text{Jumlah prasarana lalu lintas}}{\text{Jumlah kebutuhan Prasarana lalu lintas}}$	x100%	%	
			d. Halte		%		
			e. Guardrail		%		
			f. Marka jalan		%		
			g. Delineator		%		
			h. Paku jalan		%		
			i. Terminal		%		
			j. Cermin tikungan		%		
		4	Angkutan darat	$\frac{\text{Jumlah angkutan darat}}{\text{Jumlah penumpang angkutan darat}}$	x100%	%	
2.10	Meningkatnya pengelolaan sumber daya alam Pertambangan	1	Persentase pertambangan tanpa ijin	$\frac{\text{Jumlah pertambangan tanpa ijin tahun n} - \text{Jumlah pertambangan tanpa ijin tahun n-1}}{\text{jumlah pertambangan tanpa ijin tahun n-1}}$	x100%	%	Dinas PU dan Pertambangan
		2	Kontribusi sektor pertambangan terhadap PDRB	$\frac{\text{jumlah PDRB sektor pertambangan ADHB}}{\text{Jumlah total PDRB ADHB}}$	x100%	%	
2.11	Meningkatnya kualitas tenaga kerja, kesempatan kerja dan perlindungan tenaga kerja	1	Pelayanan kepesertaan Jaminan Sosial bagi pekerja /buruh	$\frac{\text{Jumlah pekerja/buruh peserta program Jamsostek aktif}}{\text{Jumlah pekerja/buruh}}$	x100%	%	Dinsosnakertrans
		2	Pencari kerja yang ditempatkan	$\frac{\text{Jumlah pencari kerja yang ditempatkan}}{\text{Jumlah pencari kerja yang mendaftar}}$	x100%	%	
		3	Persentase jumlah kasus perselisihan hubungan kerja yang diselesaikan	$\frac{\text{jumlah kasus perselisihan hubungan kerja yang diselesaikan}}{\text{jumlah kasus perselisihan hubungan kerja yang ada}}$	x100%	%	

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	RUMUS PERHITUNGAN	SATUAN	SKPD PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
	4 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	Jumlah penduduk angkatan kerja Jumlah penduduk usia kerja (15-64thn)	x100%	%	
2.12 Meningkatnya Kualitas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (UKM)	1 Prosentase Koperasi aktif	Jumlah Koperasi aktif Jumlah seluruh koperasi	x100%	%	DisperinkopUKM
	2 Persentase Usaha Mikro Kecil	Jumlah usaha mikro dan kecil Jumlah seluruh UKM	x100%	%	
	3 Persentase Usaha menengah	Jumlah usaha menengah Jumlah seluruh UKM	x100%	%	
2.13 Meningkatnya Kualitas SDA dan Lingkungan Hidup	1 Penanganan sampah	Volume sampah yang ditangani (m3) Volume produksi sampah (m3)	x100%	%	Badan Lingkungan Hidup
	2 Kebersihan	Jumlah pasar tradisional tergolong baik jumlah seluruh pasar tradisional	x100%	%	
	3 Cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan amdal.	Jumlah usaha/kegiatan wajib AMDAL/UKL-UPL yang diawasi Jumlah seluruh usaha/kegiatan wajib AMDAL/UKL-UPL	x100%	%	
	4 Tempat pembuangan sampah (TPS) per satuan penduduk	Jumlah daya tampung TPS (m3) Jumlah penduduk	x100%	%	
	5 Penegakan hukum lingkungan	Jumlah kasus lingkungan yang diselesaikan pemda Jumlah kasus lingkungan yang ada	x100%	%	
	6 Ruang terbuka hijau per satuan luas wilayah ber HPL/HGB	Luas ruang terbuka hijau Luas wilayah ber HPL/HGB	x100%	%	
2.14 Meningkatnya keberdayaan masyarakat dan desa	1 PKK aktif	Jumlah PKK aktif Jumlah PKK	x100%	%	Badan PM, Kesbang dan Pemdes
	2 Porsen Posyandu Aktif	Jumlah Posyandu Aktif Jumlah seluruh posyandu	x100%	%	
2.15 Meningkatnya Perlindungan Perempuan dan Anak	1 Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah	Pekerjaan perempuan di lembaga pemerintah Jumlah pekerja perempuan	x100%	%	Kantor KB, PP dan PA
	2 Persentase KDRT yang difasilitasi	Jumlah KDRT yang difasilitasi Jumlah kasus KDRT yang dilaporkan	x100%	%	
	3 Persentase Penyelesaian pengaduan perlindungan perempuan dan anak dari tindakan kekerasan	Jumlah Pengaduan perlindungan perempuan dan anak yang terselesaikan Jumlah Pengaduan perlindungan perempuan dan anak	x100%	%	
	4 Angka melek huruf perempuan usia 15th keatas	Jumlah anak perempuan usia > 15 yg melek huruf Jumlah anak perempuan usia > 15 tahun	x100%	%	

SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR KINERJA UTAMA		RUMUS PERHITUNGAN	SATUAN	SKPD PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
		5	Partisipasi angkatan kerja perempuan	$\frac{\text{Jumlah partisipasi angkatan kerja perempuan}}{\text{Jumlah angkatan kerja perempuan}}$	x100%	%	
3.1	Meningkatnya kualitas layanan kepada legislatif.	1	Persentase Raperda yang ditetapkan menjadi Perda	$\frac{\text{Jumlah raperda yang ditetapkan pada Tahun } n}{\text{Jumlah Raperda yang masuk pada tahun } n}$	x100%	%	Sekretariat DPRD
		2	RAPERDA yang disetujui DPRD	$\frac{\text{Jumlah Raperda yang disetujui}}{\text{Jumlah Raperda yang diusulkan}}$	x100%	%	
		3	Keputusan DPRD yang ditindaklanjuti .	$\frac{\text{Jumlah keputusan DPRD yang ditindaklanjuti oleh DPRD}}{\text{jumlah keputusan DPRD yang dihasilkan}}$	x100%	%	
3.2	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah	1	Penerbitan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tepat waktu	Bulan LKPD diterbitkan		bulan	BPKAD
		2	Persentase SKPD yang melaksanakan administrasi BMD (inventaris daerah) dengan baik	$\frac{\text{Jumlah SKPD yang melaksanakan administrasi inventaris daerah dengan baik}}{\text{Jumlah SKPD yang ada}}$	x100%	%	BPKAD
		3	Opini Laporan keuangan pemerintah daerah dengan predikat WTP	Opini yang diberikan BPK terhadap LKPD		Jenis Opini	
		4	Rasio SILPA thdp total pendapatan	$\frac{\text{Jumlah SILPA}}{\text{Jumlah Pendapatan}}$	x100%	%	BPKAD
		5	Persentase peningkatan PAD	$\frac{\text{Jumlah PAD tahun berjalan}-\text{PAD tahun lalu}}{\text{Jumlah PAD tahun lalu}}$	x100%	%	Dispenda
		6	Persentase kontribusi PAD terhadap belanja daerah	$\frac{\text{Jumlah PAD tahun berjalan}}{\text{Jumlah belanja tahun berjalan}}$	x100%	%	Dispenda
		7	Persentase kontribusi PAD terhadap total APBD	$\frac{\text{Jumlah PAD tahun berjalan}}{\text{Jumlah APBD tahun berjalan}}$	x100%	%	Dispenda
3.3	Meningkatnya Pengawasan dan Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan yang Baik dan Bersih	1	Persentase temuan hasil pengawasan yang ditindak lanjuti	$\frac{\text{Jumlah Tindak Lanjut Temuan Hasil Pengawasan yang selesai}}{\text{Jumlah Rekomendasi}}$	x100%	%	Inspektorat
		2	Persentase kasus pengaduan di lingkungan pemerintah daerah yang ditangani	$\frac{\text{Jumlah kasus pengaduan yang ditangani}}{\text{Jumlah kasus pengaduan yang diterima dalam 1 tahun}}$	x100%	%	
		3	Prosentase PKPT yang dilaksanakan.	$\frac{\text{Jumlah obyek pemeriksaan yang diperiksa dalam 1 tahun.}}{\text{Jumlah obyek pemeriksaan yang ada}}$	x100%	%	
3.4	Meningkatnya kompetensi dan kapasitas pegawai serta layanan kepegawaian.	1.	Persentase Pegawai yang mengikuti pendidikan dan latihan struktural	$\frac{\text{Jumlah pegawai yang telah mengikuti diklat PIM II, II, dan IV}}{\text{Jumlah jabatan eselon II, III, dan IV yang ada}}$	x100%	%	Badan Kepegawaian Daerah
		2.	Persentase Pegawai yang mengikuti pendidikan dan latihan teknis dan fungsional	$\frac{\text{Jumlah Pegawai yang telah mengikuti diklat Jabatan Teknis dan Fungsional}}{\text{Jumlah Pegawai yang seharusnya mengikuti diklat Teknis dan}}$	x100%	%	

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	RUMUS PERHITUNGAN	SATUAN	SKPD PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
		Fungsional			
	3. Prosentase jabatan struktural yang terisi	Jumlah pejabat struktural yang ada Jumlah jabatan struktural yang ada	x100%	%	
	4. Ratio PNS terhadap penduduk	Jumlah PNS Jumlah penduduk	x100%	%	
3.5. Meningkatnya lembaga pemerintahan yang profesional, efektif dan efisien	1. Jumlah Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang diterapkan	Unit Kerja yang menerapkan SPM		unit	Sekretariat Daerah
	2. Jumlah unit kerja yang mendapatkan nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) kategori baik	Unit kerja dengan Nilai IKM "BAIK"		unit	
	4. Prosentase kasus hukum yang diselesaikan	Jml Kasus Hukum yang terselesaikan tahun n Jumlah kasus yang ada tahun n	x100%	%	
	5. Keputusan Bupati yang ditindaklanjuti	Jumlah Keputusan Bupati yang ditindaklanjuti Jumlah Keputusan Bupati	x100%	%	
	6. Peraturan Bupati yang ditindaklanjuti	Jumlah Peraturan Bupati yang ditindaklanjuti Jumlah Peraturan Bupati	x100%	%	
3.6. Terwujudnya Mitigasi bencana alam dan kebakaran	1. Cakupan pelayanan penanggulangan bencana kebakaran	Jumlah kasus kebakaran yang tertangani thn n Jumlah seluruh kasus kebakaran tahun n	x100%	%	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	2. Cakupan pelayanan penanggulangan bencana alam	Jumlah kejadian bencana alam yang tertangani thn n Jumlah seluruh kasus kebakaran tahun n	x100%	%	
	3. Persentase kelengkapan sarana dan prasarana penanggulangan bencana alam dan kebakaran	Jumlah sarana dan prasarana penanggulangan bencana tahun n Jumlah kebutuhan sarana dan prasarana penanggulangan bencana hingga tahun n	x100%	%	
3.8. Meningkatnya tertib administrasi dan pengelolaan arsip pemerintah daerah	1. Prosentase SKPD dan Desa yang memiliki tata kearsipan baku	Jml SKPD yang menerapkan sistem kearsipan secara baku Jumlah SKPD yang ada	x100%	%	Kantor Perpustakaan, Kearsipan dan Dokumentasi
	2. Prosentase SDM pengelola kearsipan yang telah mengikuti pelatihan kearsipan	Jml personil yang mengikuti pelatihan kearsipan secara baku Jumlah personil yang seharusnya mengikuti pelatihan kearsipan	x100%	%	
3.9. Meningkatnya sistem komunikasi, informasi dan media masa	1. Intensitas update website Pemkab Sekadau per minggu	Jml update per minggu		kali	Dishubtelinforbudpar
	2. Rata-rata publikasi kegiatan Pemerintah Kabupaten Majalah	Publikasi kegiatan		kali	

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	RUMUS PERHITUNGAN	SATUAN	SKPD PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
	Radio				
	Pemutaran Film				
3.10	Meningkatnya suasana yang aman dan tertib dalam kehidupan bermasyarakat, bernegara dan kerukunan kehidupan beragama	1. Pelaksanaan operasi penegakan peraturan daerah	Kali kegiatan	kali	Satpol PP
		2. Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan) di Kabupaten	Jml Pelanggaran K3 yang diselesaikan tahun n Jml seluruh pelanggaran K3 tahun n	x100% %	
		3. Cakupan Petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas) di Kabupaten Sekadau	Jumlah tenaga pengendali keamanan dan kenyamanan lingkungan yang dibutuhkan Jumlah tenaga pengendali keamanan dan kenyamanan lingkungan yang dibutuhkan	x100% %	
		4. Persentase forum antar umat beragama yang difasilitasi	Jumlah Forum Antar Umat Beragama (FAUB) yang difasilitasi Forum Antar Umat Beragama (FAUB) yang dilaksanakan dalam 1 tahun	x100% %	
		5. Rasio personil Satpol PP terhadap jumlah penduduk	Jumlah personil Satpol PP pada akhir tahun 10.000 penduduk	x100% %	
		6. Keberadaan PERDA tentang PSK, PKL, atau PMKS	Ada / tidak		
3.11	Meningkatnya perencanaan tata ruang, pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang sesuai dengan RTRW	1. Persentase tersusunnya RDTR Perkotaan/Pedesaan	Jumlah Rencana Detail Jumlah Rencana Detail yang harus ada	x100% %	Dinas PU dan Pertmbangan
		2. Tersedianya informasi mengenai Rencana Tata Ruang (RTR) wilayah kabupaten/kota beserta rencana rincinya melalui peta analog dan peta digital.	Ada / tidak ada		
		3. Persentase rekomendasi ijin pemanfaatan ruang sesuai Perda RTRW	jml ijin sesuai RTRW Jml ijin yang masuk ke BKPRD dalam tahun n	x100% %	
		4. Rasio Rumah ber IMB	Jumlah Rumah ber IMB Jumlah Rumah keseluruhan	x100% %	
3.12	Terwujudnya perencanaan pembangunan yang aspiratif, partisipatif dan efektif	1. Penjabaran Program RPJMD kedalam RKPDP	Jumlah Program RPJMD Jumlah Program dalam RKPDP	x100% %	Bappeda
		2. Persentase Program/Kegiatan Pembangunan dalam dokumen Perencanaan Hasil Musrenbang RKPDP yang teranggarkan dalam APBD	Jumlah Program dan kegiatan dalam RKPDP Jumlah Program/Kegiatan Pembangunan yang teranggarkan dalam APBD	x100% %	

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	RUMUS PERHITUNGAN	SATUAN	SKPD PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA	
	3	Persentase pemenuhan kebutuhan data statistik daerah : - Sekadeu dalam Angka - Dokumen PDRB	Jenis buku yang disusun Jenis buku yang disusun	buku buku	BPS	
3.13	1	Cakupan kepemilikan KTP	Jml KTP yg diterbitkan s/d tahun x	x100%	%	Dinas Dukcapil
			Jml Penduduk wajib KTP s/d tahun x			
	2	Cakupan kepemilikan akta kelahiran	Jml akta kelahiran yg diterbitkan s/d tahun x Jml kelahiran yang terjadi s/d tahun x	x100%	%	
	3	Cakupan Penerbitan Kartu Keluarga	Jml yang memiliki KK s/d tahun x Jml wajib KK s/d tahun x	x100%	%	
3.14	1	Nilai Realisasi PMDN (milyar rupiah)	Jumlah penanaman modal	milyar		Kantor Penanaman Modal dan Perijinan Terpedu
	2	Tersedianya Sistem Informasi Pelayanan Perijinan online	ada / tidak	ada/tidak		
3.15	1	Sarana sosial seperti panti asuhan, panti jompo dan panti rehabilitasi	Menunjukkan jumlah sarana sosial seperti panti asuhan, panti jompo, panti rehabilitasi, rumah singgah dll yang terdapat di kab sekadeu	jmlh		Dinsosnakertrans
	2	Persentase penyandang cacat baik fisik dan mental, serta lanjut usia yang tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial	Jumlah penyandang cacat baik fisik dan mental, serta lanjut usia yang tidak potensial yang seharusnya menerima jaminan sosial dalam satu tahun Jumlah penyandang cacat baik fisik dan mental, serta lanjut usia yang tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial dalam satu tahun	x100%	%	
	3	PMKS yg memperoleh bantuan sosial	Jumlah PMKS yg diberikan bantuan Jumlah PMKS yg seharusnya menerima bantuan	x100%	%	

Diundangkan di Sekadau
pada tanggal 28 Agustus 2014

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SEKADAU

TTD

YOHANES JHON
Berita Daerah Kabupaten Sekadau Tahun 2014 Nomor 13

Ditetapkan di Sekadau
pada tanggal 13 Agustus 2014

BUPATI SEKADAU,

TTD

SIMON PETRUS

Kepala Bagian Hukum dan HAM
Setda. Kabupaten Sekadau

SUPHAN, S.Sos, M. Si
Pembina
NIP. 19750426 199412 1 001